



DINAMIKA

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 6 No. 1 Maret 2014

MODEL PENENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) SE-SOLORAYA (SUBOSUKAWONOSRATEN) TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA

Sutomo

Yunastiti Purwaningsih

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DIKUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR

Suryanto

Hermada Dekiawan

ANALISIS PENGARUH EKSPOR, INFLASI, NILAI TUKAR, DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1993-2012

Bagas Adi Prabowo

Nurul Istiqomah

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KARYAWAN PEMANEN KELAPA SAWIT DI PT SERIKAT PUTRA LUBUK RAJA RIAU

Edy Suprpto

ANALISIS PERTUMBUHAN KAWASAN AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA TAHUN 2001-2011

Lilin Fuad Zakiyah

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN BEASISWA TERHADAP INDEKS PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2012

Sri Wulan

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP INFLASI DAN SIKLUS BISNIS DI INDONESIA

Imroatul Hidayati



Diterbitkan oleh :

**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



SUSUNAN REDAKSI

- Pelindung : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS**
Dr. Wisnu Untoro, M. S
- Pembimbing : **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UNS**
Drs. Supriyono, M. Si
Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB UNS
Dra. Izza Mafruhah, Msi
- Dewan redaksi : Dr. Suryanto, S. E, M.Si
Malik Cahyadin, S. E, M. Si
Siti aisyah Tri Rahayu, S. E, M. Si
- Penanggung Jawab : Renato Ghaniyado Ismatullah
- Pemimpin Umum : Fadhila Maulida
Pemimpin Redaksi : Dewi sarwendah Indrajati
Redaksi Pelaksana : Dayu Nugraheni
Norma Sagita
- Staff Redaksi : Benedictus Dwi Wahyu atmoko
Yuliana Titis Wahyuningrum
Desy Fortuna Ratnasari
Antonia Elvina
- Layout dan Sirkulasi : Fauziah
Haris Akhmad Afandi
- Alamat Redaksi : Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan (HMJ EP)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
Gedung Sakti FEB UNS
Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Solo 57126
Telp: (0271) 647481

Jurnal Dinamika adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Diterbitkan sebagai sarana publikasi hasil pemikiran ilmiah mahasiswa dan pihak yang berkompeten, baik berupa penelitian empiris maupun artikel yang berkaitan dengan isu-isu terkini dalam bidang ilmu ekonomi atau studi pembangunan.

Tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan tanggung jawab penulis, tidak mewakili pendapat penyunting.

**ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN DAN STRATEGI
PENANGGULANGANNYA DI KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR**

Suryanto

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Surakarta

Hermada Dekiawan

Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

ABSTRACT

Economic growth of Kutai Barat has reached awesome in many years in among several regions in Kalimantan Timur. The purpose of this study was to obtain an overview of the economy, especially employment in Kutai Barat. The analysis focused on the depiction of macroeconomic conditions and the real picture in the study area.

The method of analyses was descriptive quantitative method. Macro-economic data were collected and analyzed by using statistical tools to serve the data. SWOT analysis was also used to get a descriptive of real condition of unemployment in Kutai Barat.

The results showed that at the macro level, the economy of Kutai Barat grew impressively with growth rates of 7 to 8 percent per year. Two of the highest contributor sectors to economic growth were the agricultural sector and the mining sector. The analysis showed that the demand for labor was not unequal with the labor supply in Kutai Barat. Labor supply in Kutai Barat grew along with the growth of population and migration of people from outside the area to the Kutai Barat.

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah hasil pemekaran Kabupaten Kutai pada 5 November 2000, saat ini Kutai Barat telah berusia 13 tahun. Di usia yang masih belia, perkembangan ekonomi Kutai Barat cukup positif di antara wilayah-wilayah lain di Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Barat mengandalkan sektor pertanian khususnya pertanian tanaman keras seperti karet dan kelapa sawit. Sektor pertambangan menempati posisi kedua setelah sektor pertanian sebagai contributor terbesar. Dua sektor penyumbang terbesar mengandalkan investasi yang besar sehingga dikhawatirkan masyarakat yang tidak memiliki modal menjadi tertutup peluangnya untuk ikut berperan pada dua sektor tersebut.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat selama periode 2000-2011 menunjukkan angka yang menggemblirakan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tahun 2000-2011 mencapai 6,95 persen. Sektor pertanian dan pertambangan selalu menjadi contributor terbesar bagi PDRB Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan Atas dasar hal tersebut, sangat untuk dilakukan studi

dalam rangka penyusunan kebijakan atau strategi dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Kebijakan dan strategi yang nantinya disusun perlu dilakukan secara komprehensif, sistematis, serta efektif sehingga mampu memberikan dampak yang besar dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran. Melalui penyusunan kebijakan dan strategi yang komprehensif, sistematis, dan efektif diharapkan pemda Kutai Barat mampu mengimplementasikan program dan kegiatan pengurangan tingkat pengangguran secara berkelanjutan, terarah, serta terukur sehingga dalam jangka panjang tingkat pengangguran dapat ditekan, diantisipasi, serta diberikan solusi secara optimal.

1. 2. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis kondisi makroekonomi dan ketenagakerjaan di Kutai Barat.
2. Mengkaji dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masalah ketenagakerjaan di Kutai Barat.

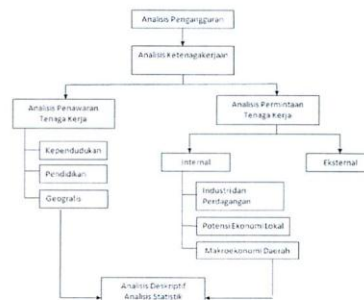
1.3. Kerangka Pikir Kegiatan

Pada dasarnya permasalahan pengangguran berkaitan dengan faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi

oleh faktor kependudukan (demografis), pendidikan, serta kondisi geografis. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi dinamika industri dan perdagangan, potensi ekonomi lokal, serta situasi makroekonomi seperti berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap output daerah (pertumbuhan ekonomi, APBD, sektoral ekonomi, dan sebagainya).

Selain itu, dinamika faktor eksternal juga berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Kutai Barat. Perkembangan pembangunan di daerah lain atau di tingkat provinsi mampu menciptakan permintaan tenaga kerja. Untuk itu analisis kegiatan ini pada dasarnya bermuara ke pasar tenaga kerja yaitu permintaan dan penawaran, beserta determinan atau berbagai faktor/variabel yang mempengaruhi. Banyak variabel atau faktor yang berpengaruh terhadap ketenagakerjaan dan pengangguran, sehingga diperlukan analisis agar faktor-faktor tersebut dapat dipetakan dengan baik.

Atas dasar hal tersebut, kerangka pikir kegiatan dijabarkan dalam diagram di bawah ini



Gambar 1. Kerangka Pikir Studi

2. Landasan Teori

2.1. Teori Penduduk dan Pembangunan Daerah

Penduduk merupakan pusat dari kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan penduduk merupakan permasalahan pembangunan dalam jangka panjang dan permasalahan tersebut membawa implikasi yang luas dalam pembangunan daerah. Atas dasar hal tersebut, penting bagi daerah untuk merumuskan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Menurut Tjiptoherijanto (2011) pembangunan berwawasan kependudukan berorientasi pada pendekatan *'bottom-up planning'*. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan *'bottom-up'* berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial

ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.

Lebih lanjut Tjiptoherijanto (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa ciri kependudukan dimasa mendatang yang harus dicermati dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ciri-ciri kependudukan tersebut antara lain:

1. Penduduk dimasa depan akan semakin tinggi pendidikannya.
2. Penduduk yang makin sehat dan angka harapan hidup naik.
3. Penduduk akan bergeser ke usia yang lebih tua.
4. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin banyak.
5. Jumlah rumah tangga akan meningkat namun ukurannya makin kecil.
6. Intensitas mobilitas penduduk yang makin tinggi.
7. Masih tingginya pertumbuhan angkatan kerja.
8. Terjadi perubahan lapangan kerja.

Berdasarkan ciri-ciri kependudukan di masa mendatang, Ananta, dkk (1995) dan Harmadi (2012) menyatakan pentingnya *grand design* kependudukan. *Grand design* ini

diperlukan khususnya untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Menurut Harmadi (2012), *grand design* meliputi tiga aspek yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, serta pembangunan keluarga. Aspek ketiga merupakan aspek yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan pembangunan karakter di keluarga.

2.2. Pengangguran, Kemiskinan, Pembangunan Ekonomi Lokal

Masalah kependudukan yang seringkali dihadapi adalah masalah yang berkaitan erat dengan pengangguran. Pengangguran sendiri muncul akibat dari kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan penawaran tenaga kerja. Tingginya penawaran kerja diakibatkan oleh meningkatnya angkatan kerja, sedangkan peningkatan angkatan kerja merupakan dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Menurut BPS, penduduk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dikelompokkan lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang bekerja dan mencari kerja

(pengangguran terbuka). Dalam angkatan kerja, jumlah penduduk yang tidak bekerja mencerminkan tingkat pengangguran yang terjadi. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah berdampak pada tingkat kemiskinan karena kebutuhan hidup tidak dapat dipenuhi akibat tidak tersedianya lapangan kerja. Oleh karena itu semakin meningkatnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas perlu diperhatikan, mengingat hal ini dapat mendorong terjadinya pengangguran apabila penduduk 15 tahun ke atas tersebut tidak bersekolah dan tidak bekerja. Pengangguran yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas aspek kehidupan. Ahli ekonomi Amartya K. Sen menyatakan, kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan mencapai standar hidup.

Salah satu strategi mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang banyak ditempuh oleh suatu negara berkembang adalah pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan bukanlah berarti menutup pengembangan sektor industri, perdagangan, maupun sektor jasa yang

berskala besar, namun pengertian pengembangan ekonomi kerakyatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat secara luas dan nyata dalam aktivitas ekonomi berdasarkan pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal yang didukung dengan sumberdaya manusia yang terampil. Pengembangan potensi ekonomi lokal tersebut diarahkan pada pengembangan skala usaha yang lebih besar, sehingga tercipta keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang (*forward dan backward linkage*).

Pembangunan ekonomi lokal menurut Bank Dunia (2001) adalah *"..the process by which actors within cities and towns – our community – works collectively with public, business and non governmental sector partners to create better conditions for economic growth and employment generation."*. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi lokal: (1) melibatkan interaksi komponen masyarakat, (2) bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut Bank Dunia mengatakan bahwa untuk mengembangkan ekonomi lokal, daerah perlu fokus pada: (1) penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) kemitraan masyarakat dan

pemerintah, (4) mendorong investasi swasta ke barang publik, dan (5) membangun daya saing lokasi.

Pengertian lain dari ekonomi lokal dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw, yaitu proses dimana pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut International Labour Organization (ILO), pembangunan ekonomi lokal adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Definisi ekonomi lokal menurut Helming adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi

pada suatu wilayah tertentu, menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Pengembangan ekonomi lokal menurut Yoga (Bappenas, 2007) memfokuskan kepada:

1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan *stakeholders* secara substansial dalam suatu kegiatan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan keamanan diri ekonomi;
4. Pembangunan keberlanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pengembangan ekonomi lokal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka pembedayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat, partisipasi pemerintah daerah, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.3. Pertumbuhan dan Potensi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan output seluruh aktivitas ekonomi masyarakat pada periode tertentu. PDRB sendiri dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendapatan hasil produksi. Hingga saat ini Indonesia menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan hasil produksi untuk menghitung PDRB.

Pendekatan penghitungan PDRB yang mampu mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat adalah pendekatan hasil produksi, karena pendekatan ini mengukur output daerah secara sektoral berdasarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Output sektoral merupakan

salah satu cerminan potensi ekonomi daerah karena dengan melihat output sektoral dapat diketahui kontribusi sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi serta struktur ekonomi suatu daerah. Selain itu, output sektoral juga dapat memberikan informasi banyaknya tenaga kerja yang terserap di masing-masing sektor ekonomi, serta sumber pendanaan perbankan terhadap masing-masing sektor ekonomi sehingga dapat teridentifikasi sektor ekonomi strategis daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai salah satu dasar penyusunan strategi pengurangan tingkat pengangguran.

Identifikasi sektor ekonomi strategis juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana tindakan yang lebih efektif dan diharapkan memiliki efek multiplier. Pemetaan sektor ekonomi strategis daerah memungkinkan disusunnya rencana dan strategi pengembangan ekonomi daerah secara efektif, karena memiliki dampak langsung terhadap berbagai variabel seperti pertumbuhan sektoral dan penyerapan tenaga kerja. Apabila dikaitkan dengan strategi pengurangan tingkat pengangguran di daerah, sektor ekonomi yang seharusnya diprioritaskan adalah sektor yang memiliki karakteristik: (1)

memiliki pertumbuhan yang tinggi, (2) mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan, (3) memiliki potensi dan sumberdaya yang memadai, dan (4) berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

2.4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Pengangguran

Dalam konteks teori ekonomi, permintaan dan penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat upah (upah minimum regional), tingkat produksi (output), laju inflasi, teknologi, serta faktor lainnya. Menurut Johnson & Lee (1987) permintaan tenaga kerja secara lebih spesifik didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan, sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Sukirno (2009) menyatakan, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (*Value of Marginal Product*,

VMP). Nilai marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product, MPP*) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit input variabel (tenaga kerja). Permintaan tenaga kerja pada dasarnya dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum permintaan. Bila harga atau tingkat upah tenaga kerja naik, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun. Dengan berkurangnya pekerja, produk fisik marginal dari input modal akan menurun karena kini setiap unit modal digarap oleh lebih sedikit pekerja.

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Disadari atau tidak tingkat kepuasan (atau tingkat ketidakpuasan) masing-masing pekerja atas suatu pekerjaan tidaklah sama, maka bisa dipahami terjadinya kemungkinan perbedaan tingkat upah yang

mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan. Terkadang seseorang mau mengorbankan rasa tidak sukanya terhadap suatu pekerjaan demi memperoleh imbalan tinggi; atau sebaliknya ada orang yang mau menerima pekerjaan yang memberi upah rendah, padahal dia bisa memperoleh pekerjaan yang memberi upah lebih tinggi, semata-mata karena ia menyukai pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan memiliki penawaran dan permintaan tersendiri yang menentukan tingkat upah serta jumlah pekerja yang bisa di serap.

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja inilah yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi. Tingginya penawaran tenaga kerja yang antara lain terlihat dari peningkatan angkatan kerja tanpa diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja akan menciptakan pengangguran di Kutai Barat. Peningkatan permintaan tenaga kerja dapat diciptakan melalui berbagai metode dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Metodologi

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner yang dirancang dan didapatkan secara *purposive sampling* sedangkan data sekunder diperoleh dari SKPD terkait.

Data primer berisi informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran riil tentang hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Profil sosial ekonomi masyarakat
2. Profil sumberdaya alam dan aktivitas ekonomi masyarakat
3. Profil permintaan dan penawaran (demand and supply labor) tenaga kerja
4. Akses informasi perilaku masyarakat dan kelembagaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan kegiatan ekonomi masyarakat (pendanaan, pelatihan, keterampilan, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, dan sebagainya).

3.2. Teknik Analisis

3.2.1. Analisis Deskriptif

Analisis ini dipergunakan untuk melihat dan mengkaji fenomena permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran di Kutai Barat berdasarkan data dan informasi yang

relevan sehingga mampu memberikan gambaran yang detail tentang situasi dan kondisi ketenagakerjaan dan pengangguran di Kutai Barat serta analisis makroekonomi yang memiliki pengaruh atau keterkaitan erat dengan ketenagakerjaan dan pengangguran. Analisis deskriptif akan menguraikan aspek ketenagakerjaan dari sisi:

1. Analisis sosial ekonomi ketenagakerjaan dan pengangguran
Analisis ini difokuskan pada deskripsi ketenagakerjaan dan pengangguran dari aspek gender, lokasi, umur, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat ketergantungan, serta aspek sosial ekonomi lain yang relevan.
2. Analisis pendidikan yang dikaitkan dengan ketenagakerjaan
Analisis akan melihat ketenagakerjaan dan pengangguran dari aspek pendidikan masyarakat termasuk pendidikan non formal sehingga diperoleh gambaran relevansi antara pendidikan dengan pengangguran dan ketenagakerjaan.

3. Analisis sosial ekonomi masyarakat

Analisis meliputi aspek sosial ekonomi yang meliputi relevansi faktor kemiskinan dengan pengangguran dan ketenagakerjaan, perkembangan jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat, latar belakang jenis pekerjaan, pendapatan perkapita masyarakat, potensi ekonomi wilayah, serta aspek sosial ekonomi lain yang relevan.

3.2.1. Analisis SWOT

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau yang lebih dikenal analisis SWOT digunakan untuk memetakan permasalahan riil di Kutai Barat. Identifikasi terhadap keempat komponen dilakukan dengan survey lapangan dan melakukan wawancara

dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan, Dinas Pendidikan, perusahaan-perusahaan tambang dan pertanian, serta calon-calon tenagakerja.

4. Analisis Data

4.1. Analisis Aspek Pendidikan dalam Pengangguran

Dari sisi kelompok umur, sebagian besar pengangguran adalah penduduk yang berumur 15-19 tahun (35,83%) dan kelompok umur 20-24 tahun (25,53%). Untuk pengangguran dengan kelompok umur 15-19 tahun tersebut, sebagian besar pengangguran berpendidikan SMTA Nonkejuruan (43,53%) sedangkan kelompok umur 20-24 tahun juga memiliki pola yang sama, yaitu 47,58% berpendidikan SMTA Nonkejuruan.

Tabel 1 Pengangguran di Kutai Barat Berdasarkan Umur dan Pendidikan Tahun 2012

Golongan Umur	Pendidikan						Jumlah
	≤ SD	SMP	SMTA Umum	SMTA Kejuruan	Diploma I/II/III/Akademi	Universitas	
15-19	428	828	1.212	316	-	-	2.784
20-24	624	344	944	72	-	-	1.984
25-29	857	91	360	-	-	-	1.308
30-34	721	91	224	-	-	-	1.036
35-39	-	334	75	-	-	-	409
40-44	-	-	-	-	-	-	-
45-49	58	-	-	-	-	-	58
50-54	192	-	-	-	-	-	192
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
≥ 65	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.880	1.688	2.815	388	-	-	7.771

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Nakertrans

Secara keseluruhan, dari total jumlah pengangguran 2012, para penganggur sebagian besar adalah penduduk dengan pendidikan paling tinggi SD serta penduduk yang berpendidikan SMTA Nonkejuruan. Data di atas mengindikasikan bahwa: (1) banyak penduduk yang memutuskan untuk bekerja setelah lulus dari SD, SMP, serta SMA dengan berbagai alasan atau pertimbangan, (2) sangat kecil penduduk yang berlatarbelakang SMTA Kejuruan (SMK) yang menganggur, dan (3) tidak ada pengangguran dari penduduk yang berijazah perguruan tinggi baik diploma maupun sarjana. Hal ini mengindikasikan pentingnya faktor pendidikan sebagai bagian yang tidak

terpisah dalam merumuskan strategi penanggulangan pengangguran.

Salah satu hal menarik adalah tingginya penduduk berpendidikan SMTA dan berumur 15-19 tahun yang menganggur, yaitu 1.212 atau 15,60% dari total jumlah penganggur. Dilihat dari kelompok umurnya, mereka adalah orang yang baru lulus SMTA. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penduduk tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi setelah lulus dari SMTA, namun langsung terjun ke dunia kerja padahal pendidikan SMTA memang didisain untuk tidak dipersiapkan masuk ke dunia kerja sebagaimana SMK. Pola seperti ini menyebabkan kurang efektifnya pendidikan SMTA di Kutai Barat sehingga perlu adanya kebijakan dan strategi agar penduduk yang

mengambil jalur pendidikan SMTA mampu melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, atau memang apabila telah direncanakan akan bekerja setelah lulus, mereka dapat menempuh pendidikan di jalur kejuruan.

Data tentang pendidikan dan aktivitas yang mereka lakukan menunjukkan bahwa dari jumlah penganggur yang ada, sebanyak 5.440 atau 70,00% dalam kondisi mencari pekerjaan, dan tidak ada yang beraktivitas mempersiapkan usaha atau

berwirausaha. Sementara itu sisanya 2.331 atau 30,00% dalam kondisi tidak mencari pekerjaan. Dari jumlah yang masuk dalam kategori tidak mencari pekerjaan, sebanyak 811 diantaranya atau 34,79% berpendidikan SMTA. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan yang berpendidikan SD sebanyak 878 orang atau 37,67%. Banyak kemungkinan yang mereka lakukan apabila tidak berkativitas mencari pekerjaan atau mencoba mulai mempersiapkan usaha.

Tabel 2 Kegiatan Pengangguran Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Kategori				Jumlah
	Mencari pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Tidak mencari pekerjaan	Sudah punya kerja tapi belum mulai bekerja	
≤ SD	2.002	-	878	-	288
SMTA	1.046	-	642	-	1.688
SMTA Umum	2.004	-	811	-	2.815
SMTA Kejuruan	388	-	-	-	388
Diploma I/II/III/Akademi	-	-	-	-	-
Universitas	-	-	-	-	-
Jumlah	5.440	-	2.331	-	7.771

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Nakertrans

Belum adanya inisiatif atau keinginan untuk berwirausaha dipengaruhi oleh banyak hal, seperti budaya, motivasi, pengetahuan (tidak memahami cara memulai wirausaha), serta faktor lainnya. Tanpa adanya dorongan untuk berwirausaha, aktivitas penciptaan lapangan kerja menjadi beban

pemerintah daerah sepenuhnya. Bila dilihat lebih jauh dari sisi geografis, sebagian besar pengangguran (78,82%) berasal dari pedesaan dan hanya 21,18% yang berasal dari perkotaan. Penduduk yang berpendidikan SMTA misalnya, dari total 2.815 yang menganggur sebanyak 2.388 atau 84,83% berasal

dari pedesaan. Demikian juga untuk yang berpendidikan SMTP dari 1.688 penganggur sebanyak 1.218 atau 72,16% berasal dari pedesaan.

Tabel 3 Pengangguran Berdasarkan Pendidikan dan Geografis

Pendidikan	Daerah		Jumlah
	Perkotaan	Pedesaan	
≤ SD	533	2.347	2.880
SMTP	470	1.218	1.688
SMTA Umum	427	2.388	2.815
SMTA Kejuruan	216	172	388
Diploma I/II/III/Akademi	-	-	-
Universitas	-	-	-
Jumlah	1.646	6.125	7.771

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Nakertrans

Dalam konteks penduduk mencari pekerjaan atau ingin bekerja pada pihak lain, pengangguran secara teoritis diartikan penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaannya pada tingkat upah atau gaji tertentu. Para pengguna tenaga

kerja tidak jarang menginginkan calon tenaga kerja memiliki keahlian tertentu sehingga proses adaptasi tidak membutuhkan waktu yang lama dan pengguna tenaga kerja tidak perlu mengeluarkan dana untuk melatih mereka sebelumnya. Demikian pula apabila dipandang dari konteks kewirasahaan, umumnya mereka yang memiliki keterampilan tertentu lebih mampu memulai usaha karena telah memiliki bayangan apa yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, dari total jumlah penganggur sebanyak 7.771 orang, 7.563 diantaranya atau 97,32% adalah mereka yang tidak memiliki keterampilan tertentu. Jumlah tersebut relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sisanya sebanyak 280 orang penganggur atau 2,68% adalah mereka yang memiliki keterampilan tata niaga dan berjenis kelamin laki-laki semua.

Tabel 4 Keterampilan Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterampilan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Otomotif	-	-	-
Listrik/elektronika	-	-	-
Bangunan	-	-	-
Teknik mekanik	-	-	-
Tata niaga	208	-	208
Aneka kejuruan	-	-	-
Pariwisata	-	-	-
Pertanian	-	-	-
Tidak mengikuti kursus	3.699	3.864	7.563
Jumlah	3.907	3.864	7.771

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Nakertrans

Berdasarkan data Tabel 4, sangat mungkin adanya korelasi kuat antara pengangguran dengan keterampilan yang mereka miliki. Keterampilan akan mempercepat proses adaptasi dengan jenis pekerjaan, baik bekerja pada orang lain maupun berwirausaha. Lulus pendidikan khususnya jenjang SMTA atau SMK tanpa dibekali dengan keterampilan yang memadai dapat mendorong munculnya pengangguran.

4.2. Distribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi

Potensi suatu daerah merupakan salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pengangguran. Banyak cara atau metode yang dapat dipergunakan untuk melihat potensi ekonomi daerah. Metode tersebut akan bermuara ukuran-ukuran yang mampu menggambarkan potensi ekonomi daerah, sehingga dengan mengetahui posisi potensi ekonominya diharapkan rumusan kebijakan dan strategi dapat diaktikan

dengan upaya mengatasi pengangguran secara lebih efektif. Beberapa ukuran yang dapat dipergunakan untuk melihat potensi sektor ekonomi misalnya: (1) pertumbuhan sektor tersebut selama beberapa periode, (2) kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah, (3) pangsa sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB, (4) kemampuan sektor menyerap tenaga kerja, (5) elatisitas tenaga kerja sektor ekonomi, (6) dan sebagainya.

Dari aspek pertumbuhan sektor ekonomi, selama 2008-2011 sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu rata-rata 12,60% per tahun. Demikian pula dengan sektor pertambangan dan penggalian yang pada periode yang sama mampu tumbuh rata-rata sebesar 8,88% per tahun serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran rata-rata tumbuh sebesar 7,03% per tahun. Sektor pertanian merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan yang paling kecil yaitu 1,88% per tahun.

Tabel 5 Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000

LAPANGAN USAHA	2000	2008	2009	2010	2011	Rata-rata Pertumbuhan 2008-2011	Rata-rata Pertumbuhan 2000-2011
Pertanian	442.233,73	487.868,93	493.447,72	514.619,18	515.929,95	1,88	1,41
Pertambangan dan Penggalian	651.320,96	1.451.724,52	1.586.624,63	1.708.022,82	1.873.774,88	8,88	10,08
Industri Pengolahan	35.778,26	69.517,63	72.165,14	73.108,07	77.156,10	3,54	7,24
Listrik, Gas dan Air Minum	2.792,06	7.452,72	7.691,66	7.792,89	8.159,79	3,07	10,24
Bangunan	158.888,25	410.369,69	436.527,00	440.745,39	491.922,66	6,23	10,82
Perdagangan, Hotel & Restoran	107.953,83	220.463,05	227.911,30	256.542,80	270.325,98	7,03	8,70
Pengangkutan dan Komunikasi	24.010,21	44.905,87	55.488,16	58.427,17	64.111,96	12,60	9,34
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	32.331,89	66.345,62	70.262,27	71.341,97	75.904,32	4,59	8,07
Jasa-jasa	55.748,80	109.353,14	116.214,01	121.945,17	130.726,41	6,13	8,06
PDRB	1.511.057,99	2.868.001,17	3.066.331,89	3.252.545,46	3.508.012,05	6,95	7,96

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2012, diolah.

Bila dihitung dari 2000-2011, hasil yang diperoleh mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan karena beberapa sektor pada periode 2000-2008 mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu hampir semua sektor mengalami kenaikan minimal dua kali lipat, kecuali sektor pertanian yang mengalami kenaikan kecil. Dalam kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan, pertumbuhan riil sektor ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi menggambarkan bahwa aktivitas sektor tersebut berjalan dinamis, namun informasi pertumbuhan sektor ekonomi yang tinggi saja tidak cukup untuk

dijadikan kesimpulan bahwa sektor tersebut memiliki prospek dalam hal kemampuan menyerap tenaga kerja. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Sektor pertanian misalnya, dari sisi rata-rata pertumbuhan tergolong yang terkecil, namun sebagian besar tenaga kerja justru bekerja di sektor pertanian. Dari 81.477 tenaga kerja pada tahun 2008, sebanyak 62.910 diantaranya atau 77,21% bekerja di sektor pertanian. Jumlah ini menurun di tahun 2011 menjadi 50.248 atau 66,52% dari total tenaga kerja di tahun 2011, namun tetap menandai sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar.

Tabel 6 Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi

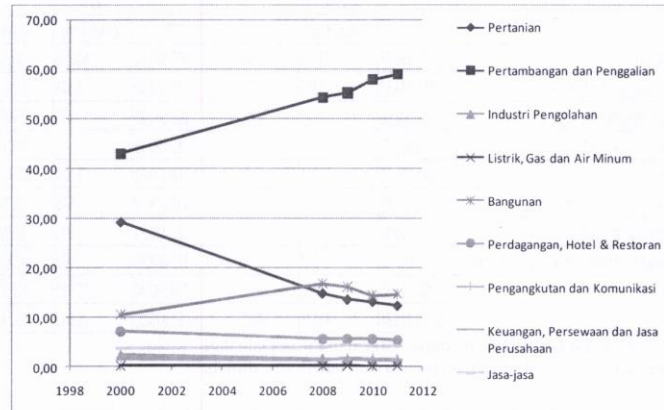
LAPANGAN USAHA	2008			2011		
	PDRB	Tenaga Kerja	Efisiensi	PDRB	Tenaga Kerja	Efisiensi
Pertanian	780.880,07	62910	12,41	1.002.584,01	50.248	19,95
Pertambangan dan Penggalian	2.864.833,33	3360	852,63	4.771.372,80	4.378	1089,85
Industri Pengolahan	86.008,60	1149	74,86	108.563,23	455	238,60
Listrik, Gas dan Air Minum	8.915,79	67	133,07	11.196,15	71	157,69
Bangunan	883.588,55	931	949,07	1.178.109,02	1.627	724,10
Perdagangan, Hotel & Restoran	298.810,83	4708	63,47	437.673,48	6.578	66,54
Pengangkutan dan Komunikasi	75409,47	1017	74,15	129.248,71	995	129,90
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	86.067,57	267	322,35	111.688,38	266	419,88
Jasa-jasa	202.717,39	7068	28,68	333.540,20	10.919	30,55
PDRB	5.269.231,81	81477	64,67	8.083.976,00	75.537	107,02

Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2012 dan Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Nakertrans, diolah.

Keterkaitan antara output yang tercermin melalui PDRB riil dengan tenaga kerja dapat menghasilkan informasi efisiensi sektor ekonomi. Implikasi dari tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian namun nilai tambah sektor ini sendiri relatif kecil menyebabkan relatif rendahnya tingkat efisiensi sektor pertanian. Bila pada tahun 2008 tingkat efisiensi sektor ini adalah 12,41 maka pada tahun 2011 tingkat efisiensi sektor pertanian meningkat menjadi 19,95. Angka efisiensi ini mengandung arti bahwa

rata-rata setiap tenaga kerja memberikan kontribusi sebesar Rp19,95 juta. Bila dibandingkan dengan sektor lain, angka ini sangat kecil. Bandingkan misalnya dengan sektor pertambangan dan penggalian atau sektor bangunan yang jauh lebih tinggi. Dengan demikian struktur sektor pertanian di Kutai Barat adalah *labor intensive*. Peningkatan efisiensi tidak diartikan sebagai pengurangan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, namun lebih pada peningkatan kemampuan output per tenaga kerja.

Gambar 1 Distribusi Sektoral PDRB Tahun 2000-2011 (%)



Sumber: Kutai Barat Dalam Angka 2012, diolah.

Namun, distribusi sektor ekonomi yang semakin kecil tersebut tidak berkaitan dengan kecilnya nilai tambah sektor terhadap PDRB sehingga semakin kecil pangsa suatu sektor tidak berarti nilai tambah sektor tersebut terhadap PDRB juga semakin kecil dan berimplikasi pada kecilnya daya serap tenaga kerja. Pangsa sektor ekonomi lebih menggambarkan struktur perekonomian Kutai Barat saat ini dan kecenderungan di masa mendatang. Dengan mengetahui struktur ekonomi Kutai Barat, diharapkan perencanaan tenaga kerja dapat disusun secara makro dan mikro dengan lebih komprehensif.

4.4. Deskripsi SWOT Observasi Lapangan

4.4.1. Kekuatan

Kajian terhadap kekuatan yang dimiliki oleh tenaga kerja Kutai Barat adalah sumber daya lokal tidak rentan konflik sosial. Penduduk lokal lebih mudah untuk beradaptasi dengan masyarakat sehingga potensi konflik dengan penduduk yang lain rendah. Dukungan dari pemerintah daerah dan perusahaan yang beroperasi di daerah untuk mengutamakan penduduk lokal. Dengan mempekerjakan penduduk lokal maka kebutuhan untuk mass atau tempat tinggal karyawan tidak menjadi masalah. Dari sisi makro, Kutai Barat memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta daya saing tenaga kerja khususnya sektor pertanian, bangunan, serta sektor

pertambangan dan penggalian yang cukup tinggi. Kekayaan alam juga merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Kutai Barat.

4.4.2. Kelemahan

Kelemahan yang menonjol dari masyarakat Kutai Barat adalah kemampuan teknis dan skill. Sebagian besar perusahaan atau lapangan pekerjaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, penduduk lokal belum mampu menjawab tantangan tersebut. Sektor pertambangan sangat banyak membutuhkan tenaga kerja namun yang bisa diisi oleh masyarakat lokal hanya terbatas mengingat kemampuan kita juga terbatas. Tenaga kerja lokal paling banyak mengisi lowongan pekerjaan pada tingkat operator di lapangan. Pada level lebih tinggi tenaga kerja masih banyak yang belum mampu mengisinya. Kemampuan manajemen dan kemampuan keahlian masih perlu ditingkatkan misalnya kemampuan bahasa inggris. Kemampuan berbahasa inggris menjadi tuntutan mutlak bagi tenaga kerja yang ingin menduduki level manajemen. Perusahaan tambang yang ada di Kutai Barat banyak yang berasal dari luar negeri, sehingga bahasa percakapan yang dibutuhkan adalah bahasa inggris.

Rendahnya tingkat pendidikan juga kelemahan bagi tenaga kerja asal Kutai Barat. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala untuk memasuki lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Minat dan motivasi kerja yang rendah menjadi kelemahan yang utama bagi penduduk lokal Kutai Barat. Angkatan kerja di Kutai Barat memiliki motivasi rendah untuk maju dan mempelajari sesuatu yang baru. Motivasi rendah diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: sebagian besar penduduk masih memiliki perkebunan yang cukup luas.

4.4.3. Peluang

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa narasumber diketahui bahwa peluang kerja di beberapa sektor masih sangat terbuka. Sektor-sektor tersebut misalnya sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa konstruksi, sektor perdagangan, dan sektor transportasi. Sektor pertanian yang berpotensi dikembangkan adalah untuk jenis padi, sayuran, buah-buahan, dan juga peternakan. Lahan yang luas dan subur menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Kebutuhan bahan makanan pokok menjadikan sektor ini akan menjadi sektor yang potensial. Dengan jumlah penduduk yang terus

berkembang dan meningkatnya aktifitas kegiatan ekonomi menjadikan permintaan terhadap komoditas pertanian tidak akan kehilangan pasarnya. Apabila selama ini komoditas pertanian belum bisa dipenuhi oleh masyarakat Kutai Barat maka dengan strategi pembangunan yang tepat diharapkan Kutai Barat dapat mengoptimalkan potensinya. Jumlah lapangan pekerjaan bertambah apabila kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat sendiri.

Sektor pertambangan, peluang kerja di sektor pertambangan terbuka luas bagi masyarakat Kutai Barat untuk mengisinya. Banyak perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah ini, peluang kerja yang tersedia di sektor tambang antara lain: operator, administrasi, bahkan manajerial. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor yang juga berpotensi untuk berkembang di saat ini dan masa yang akan datang. Potensi tambang batu bara yang banyak dikelola oleh perusahaan asing atau investor nasional menjadikan sektor ini turut berkembang.

Penginapan yang layak bagi tamu-tamu Kutai Barat menjadi peluang bisnis sangat prospektif. Semakin

banyak penginapan dibuka, tentu semakin banyak peluang kerja dibuka. Kuliner eksotik yang khas Kutai Barat juga merupakan peluang kerja dapat diantisipasi untuk diisi oleh masyarakat Kutai Barat. Efek multiplier dari bisnis kuliner dapat membuka lapangan kerja yang lain sebagai contoh meningkatnya kebutuhan bahan baku, sarana transportasi, dan juga retail.

4.4.4. Tantangan

Perkembangan wilayah yang pesat tentu akan berdampak pada tingginya arus masuk penduduk dari luar Kutai Barat. Wilayah Kutai Barat saat ini bermukim penduduk yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Kehadiran penduduk luar daerah Kutai Barat dapat menjadi motor penggerak pembangunan di Kutai Barat, namun juga kehadiran mereka juga bisa menjadi ancaman bagi penduduk lokal untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Dari hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa sektor informal sebagian besar dikelola oleh masyarakat yang awalnya adalah pendatang. Mereka mampu melihat peluang pasar dan berusaha untuk menjawab peluang tersebut. Perdagangan kebutuhan bahan bangunan, alat-alat listrik, alat-alat tambang, dan alat-alat pertanian dapat

dipenuhi oleh penduduk luar wilayah Kutai Barat. Hal ini mengingat perekonomian Kabupaten Kutai Barat banyak ditopang oleh sektor pertanian dan pertambangan. Kebutuhan terhadap produk-produk elektronika juga akan disuplai oleh penduduk luar Kabupaten apabila penduduk Kutai Barat tidak memanfaatkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai kondisi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari sisi kelompok umur, sebagian besar pengangguran adalah penduduk yang berumur 15-19 tahun (35,83%) dan kelompok umur 20-24 tahun (25,53%). Sebagian besar pengangguran (97,32% dari 7.771 orang sekitar 7.563) adalah mereka yang tidak memiliki keterampilan tertentu. Struktur perekonomian Kutai Barat yang didominasi oleh pertanian menunjukkan struktur sektor pertanian di Kutai Barat adalah *labor intensive*. Peningkatan efisiensi tidak diartikan sebagai pengurangan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, namun lebih pada peningkatan kemampuan output per tenaga kerja.

2. Analisis SWOT disimpulkan bahwa sebagian besar pengangguran di Kutai Barat memiliki motivasi berkembang yang rendah, kemampuan penguasaan teknologi dan bahasa asing yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah. Sementara itu, peluang untuk mengembangkan ekonomi di Kutai Barat sangat terbuka seperti misalnya sektor perdagangan, transportasi, hotel dan restoran.

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. 1995, "Revolusi Demografi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia" dalam buku: **Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan**, editor Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan. Jakarta: Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- BPS, 2012, Kutai Barat dalam Angka. BPS. Sendawar.
- Hal Hill, 1996, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1996: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif, PAU (Studi Ekonomi) UGM & PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Iskandar, N: 1974, Beberapa Aspek Permasalahan Kependudukan di Indonesia, *special Reprint series No.4, demographic Institute FEUI Jakarta, January 1974, p.19.*

- Johnson, D.G. and Lee, Ronald. 1987. Population Growth and Economic Development Issues and Evidences. Madison, WI: University of Winsconsin Press, USA
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1994, Indonesia Country Report Population and Development, Jakarta, Indonesia.
- Kantor Menteri Negara kependudukan/BKKBN, 1997, Draft Repelita VII Bidang Kependudukan, Jakarta, 1997
- Krugman, Paul, 1994, "The Myth of Asia Miracle", Fortune, 18 November 1994 *Foreign Affairs*.
- Krugman, Paul, 1997, "What Happened to Asia Miracle", Fortune, 18 November 1997
- Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, 1997, Strategi Kebijakan Kependudukan, ceramah di SESKO ABRI, Bandung 6 Nopember 1998
- Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Nakertrans, <http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/> diakses 20 Desember 2013.
- Sukirno, Sadono. (2009) Pengantar Ekonomi Mikro. Rajawali Press. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Priyono 1999, Economic Crisis and Recovery: The Indonesia's Case. makalah disampaikan pada "The EWCA Regional Conference in the Philippines on Asia the Pacific in the Millenium: Challenges, Opportunities & Responses", Manila, Philippines. 28-29 January 1999
- Tjiptoherijanto, Priyono. 2011. Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan. *Jurnal Pembangunan Berwawasan Kependudukan*.
- Laporan Bank Dunia, 2001. www.worldbank.org. diakses tanggal 20 Desember 2013.